

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan manajemen keuangan pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Manajemen keuangan adalah salah satu hal yang paling penting sebab penyelenggaraan pemerintah tidak mungkin terlepas dari proses pembiayaan dan pengeluaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23. 1 Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahunnya Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dalam sector financial. Sistem manajemen keuangan tersebut inilah yang akan memastikan tata kelola keuangan dapat berjalan dengan semestinya dan terhindar dari praktik kecurangan. Maka dari itu, harus dibentuk melalui penegakan sistem keuangan yang baik dan berstruktur agar dapat memenuhi tuntutan dinamika pemerintahan dan pembangunan.

Tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Menurut Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Maka dari itu, seluruh instansi pemerintah dituntut untuk menyusun sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) untuk membuat suatu laporan akuntabilitas atas kinerjanya.

Dampak positif dalam keharusan untuk menyusun LAKIP mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kinerja dan performa yang terbaik untuk ditampilkan dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya pengukuran kinerja seperti ini, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengelola Sumber Daya Negara dan kebijakan yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan negara. Tujuan diadakannya LAKIP ini agar pengambilan keputusan di masa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Untuk menilai efektif dan efisien sebuah LAKIP, penulis menggunakan metode value for money dengan menggunakan standar kriteria pengukuran persentase penilaian dari Metode Penilaian Kuantitatif (Prasetyo, et al :110). Metode Analisis value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. value for money dianggap sesuai dalam organisasi sektor publik dikarenakan value for money tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi aspek kualitatif-nonfinansial. Hal ini searah dengan organisasi sektor publik yang menempakan laba bukan sebagai ukuran kinerja utama, tetapi pelayanan yang bersifat non keuangan (Kaplan dan Norton, 2011)

Permasalahan yang paling sering ditemui dalam sebuah lakip adalah ditemukannya realisasi anggaran serta pencapaiannya yang tidak selaras dalam sebuah program kegiatan yang tidak jelas keterangannya sehingga sering kali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



LAKIP terkadang tidak selaras dengan Renstra yang disusun oleh pemerintah. Penulis ingin melakukan analisis terhadap LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dengan menggunakan pendekatan *value for money*, menggunakan periode dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Karena dalam laporan ini penulis mengacu pada suatu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam menghasilkan desa yang menggunakan profil berbasis online, dan program tersebut baru berjalan efektif pada tahun 2018. Oleh karena itu, penulis akan membahas dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul “Analisis Laporan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah tercantum, maka topik yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Analisis Laporan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang. Maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan LAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang?
2. Bagaimana cara menilai efektivitas dan efisiensi LAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang menggunakan metode *value for money*?
3. Bagaimana menganalisa kinerja LAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang?

1.3 Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses penyusunan LAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.
2. Mengetahui penilaian efektivitas dan efisiensi LAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang menggunakan metode *value for money*.
3. Untuk menguraikan hasil evaluasi dan penilaian kinerja LAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

1.4 Manfaat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

Aspek praktis atau operasional

Bagi Pemerintah Kabupaten Subang sebagai bahan evaluasi dalam implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Aspek Teoritis

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai LAKIP di pemerintahan daerah.
- b. Bagi pembaca diharapkan hasil penulisan ini dapat menambahkan kebermanfaatannya serta pengetahuan tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.